

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL OLEH GURU TERHADAP SANTRIWATI

Oleh

JUOAN CESA HAFIZ ALFARIDZI

Berfokus pada Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati bukanlah hal yang baru, Pada sekitar Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di sebuah Yayasan Pondok Pesantren di daerah Kecamatan Cibiru Kota Bandung terdapat kasus tindak pidana terhadap santriwati yang dilakukan oleh seorang pimpinan Pesantren. Penegakan hukum dibutuhkan khususnya peran dari penyidik kepolisian untuk menangani kasus terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam hal penegakan hukumnya. Skripsi ini akan fokus membahas tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati.

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Narasumber terdiri dari penyidik pada Ditreskrim Kepolisian pada Polda Jawa Barat dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati dilakukan dengan adanya beberapa tahapan yang pertama tahap aplikasi yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam hal ini dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus ini menerapkan Pasal 81 ayat (1), (3), dan (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kedua tahap eksekusi

Juoan Cesa Hafiz Alfaridzi

dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sampai saat ini sudah mencapai kepada putusan Kasasi artinya pada saat putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan pidana penjara seumur hidup selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat, selanjutnya hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan pidana mati dan membayar restitusi kepada korban. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana pada tindak kekerasan seksual oleh guru terhadap santriwati adalah peraturan perundang-undangan menjelaskan banyaknya pasal-pasal yang mengatur terkait kasus ini diantaranya ada, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Saran dari penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual oleh guru terhadap santrwati, diharapkan khususnya Kepolisian dapat mengambil keputusan objektif dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam menafsir pasalPasal dalam Perundang-undangan terkait. Perlunya dilakukan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual dan mendorong semua pihak terus memberikan edukasi terkait pentingnya penghapusan tindak kekerasan seksual, terutama di lingkungan Pendidikan, terkhusus lagi perlu dilakukan semacam konseling atau Pendidikan tentang kekerasan seksual di pondok pesantren.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Kekerasan Seksual, Santriwati

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF SEXUAL VIOLENCE BY TEACHER AGAINST STUDENTS

By

JUOAN CESA HAFIZ ALFARIDZI

Focusing on law enforcement against criminal acts of sexual violence by teachers against female students is nothing new. Around 2016 to 2021 at an Islamic boarding school foundation in the Cibiru sub-district, Bandung City, there was a case of criminal acts against female students committed by a Islamic boarding school leader. . Law enforcement is needed, especially the role of police investigators to handle cases of rape perpetrators in terms of law enforcement. This thesis will focus on discussing the enforcement of criminal law against acts of sexual violence by teachers against female students and the inhibiting factors of criminal law enforcement against criminal acts of sexual violence by teachers against female students.

The problem approach used in this study is a normative juridical and empirical juridical approach. Data sources are primary data and secondary data. The resource persons consisted of investigators at the Police Ditreskrim at the West Java Regional Police and Lecturers in the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was carried out through literature study and field study techniques. Then the data were analyzed qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the enforcement of criminal law against acts of sexual violence by teachers against female students is carried out with several stages, the first is the application stage, namely Law Number 17 of 2016 concerning protection Children and Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. In this case the charges filed by the Public Prosecutor against this case apply Article 81 paragraphs 1, 2 and 5 of Law Number 17 of

Juoan Cesa Hafiz Alfaridzi

2016 concerning Child Protection. The second stage of execution, in this case the implementation of law enforcement against the perpetrators of the Crime of Sexual Violence to date has reached a cassation decision, meaning that at the first level decision the Bandung District Court sentenced the perpetrator to life imprisonment and then the Public Prosecutor at the Java High Court Barat submitted an appeal to the West Java High Court, whereupon the judge sentenced the perpetrator to death penalty and paid restitution to the victim. The inhibiting factor in enforcing criminal law on acts of sexual violence by teachers against female students is the statutory regulations explaining the many articles that regulate this case, including the Child Protection Act, and the Law on Sexual Violence Crimes.

The suggestion from this study is that law enforcement officials who handle cases of sexual violence by teachers against students, it is expected that the Police in particular can make objective decisions by considering legal facts in interpreting the Articles in the relevant legislation. It is necessary to carry out rehabilitation for victims of sexual violence and encourage all parties to continue to provide education regarding the importance of eliminating acts of sexual violence, especially in the educational environment, especially in the form of counseling or education regarding sexual violence in Islamic boarding schools.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Sexual Violence, Female students.